

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Artikel

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widayani Soetjipto

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

Ida Ruwaida

Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Mary Austin

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

Diah Irawaty

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

Purnama Sari Pelupessy

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

Sargini, Jumiyem, Muryanti

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

Maria Ulfah Anshor

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

Anita Dhewy

Wawancara

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi"

Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia

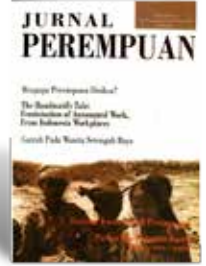
Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

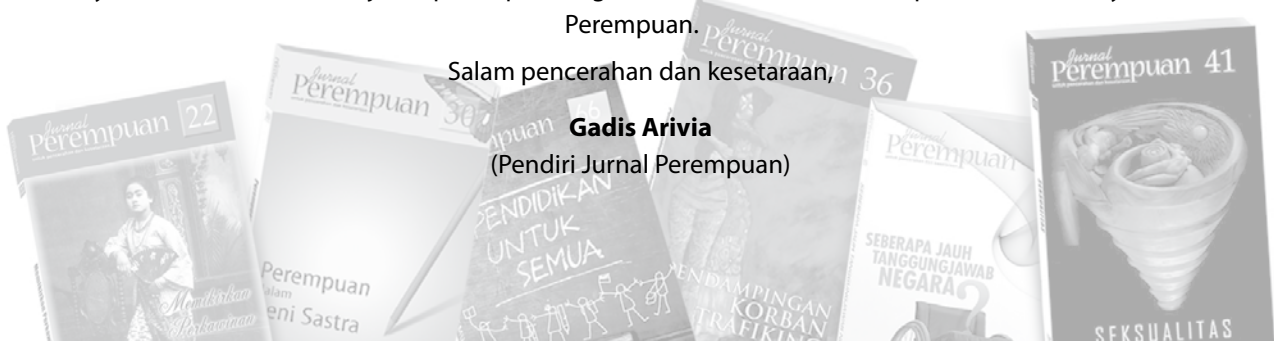
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Agustus 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran / *Local and Migrant Domestic Workers* iii

Artikel / Articles

- Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia / *Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers* 179-190
Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto
- Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung / *Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung* 191-200
Ida Ruwaida
- Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia / *Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the Campaign for Domestic Worker Legislation in Indonesia* 201-213
Mary Austin
- Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru / *Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era* 215-226
Diah Irawaty
- Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang / *Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting* 227-237
Purnama Sari Pelupessy
- Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya / *Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge* 239-247
Sargini, Jumiyem, Muryanti
- Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak / *Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare* 249-260
Maria Ulfah Anshor
- Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT / *Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers* 261-271
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi" / *Arum Ratnawati: "Violence against Domestic Workers Caused by the Non-recognition of Domestic Workers as a Profession"* 273-277
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono 279-280

Profil / Profile

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga / *Lita Anggraini: Class Bias Still a Major Barrier in Advocating the Bill on Protection of Domestic Workers* 281-287
Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / Book Review

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia / *The Search for Justice for Domestic Workers and Child Domestic Workers in Indonesia*..... 289-294
Naufaludin Ismail

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Local and Migrant Domestic Workers

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki peran penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi negara. Sayangnya, peran PRT jarang diperhitungkan, meskipun sebenarnya, pekerjaan rumah tangga—termasuk pekerjaan merawat atau mengasuh—merupakan aktivitas yang kompleks dengan implikasi mendalam bagi kesejahteraan pribadi, sosial dan ekonomi. Hal ini mengingat keberadaan PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga, memungkinkan anggota rumah tangga melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di luar rumah yang pada gilirannya memungkinkan sektor publik berjalan dengan baik. Selain jarang diperhitungkan, peran PRT sebagai pekerja juga kerap tak terlihat. Menurut Wong (2012) hal ini dikarenakan, pertama, rumah tangga secara konvensional dianggap sebagai keutamaan feminin, yang kemudian membatasi perempuan pada urusan rumah tangga dan tergantung pada laki-laki. Kedua, karena para ibu telah melakukan pekerjaan rumah tangga—tanpa dibayar, dengan asumsi bahwa hal itu dilakukan dengan sukarela—mereka tidak dikenali sebagai “pekerja sejati/sungguhan”, karena pekerjaan yang tidak dibayar tidak dipandang sebagai “pekerjaan”. Ketiga, pekerjaan ini sering dipandang secara alami sebagai pekerjaan perempuan. Karena pekerjaan ini dianggap dapat dikerjakan “secara alamiah”, sebagai lawan “dengan keterampilan/kemahiran” (yang membutuhkan pelatihan dan penghargaan), maka pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak dihargai. Pandangan tradisional mengenai pekerjaan rumah tangga telah berkontribusi terhadap ketaktampakan pekerja rumah tangga, yang dilanggengkan oleh relasi di dalam keluarga, masyarakat dan aturan yang sistematis, yang mewujud dalam bentuk upah yang rendah dan kadang tak layak bagi pekerja rumah tangga.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan satu dari setiap 25 pekerja perempuan di dunia adalah pekerja rumah tangga. Meskipun sejumlah besar pria bekerja di sektor ini—seringkali sebagai tukang kebun, sopir atau kepala pelayan—tetapi sektor ini merupakan sektor yang sangat feminin, 80 persen dari semua pekerja rumah tangga adalah perempuan. Di Indonesia berdasarkan hasil analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan 1,7 juta

diantaranya bekerja di pulau Jawa (ILO 2013). Sementara itu dari sekitar 6,5 juta pekerja migran Indonesia, sekitar 80 persennya merupakan PRT migran (ILO 2012). Para pekerja rumah tangga di Indonesia pada umumnya adalah perempuan, berasal dari pedesaan dan berpendidikan rendah. Mayoritas PRT di Indonesia tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, lisan ataupun tertulis dengan majikan mengenai pekerjaan yang menjadi kewajibannya, jam kerja, hari libur mingguan dan upah yang akan diterima. Disamping itu PRT juga jarang memiliki jaminan perlindungan sosial (Migrant CARE & Jala-PRT 2016).

Data Jala-PRT memperlihatkan hingga September 2016 terdapat 217 kasus kekerasan terhadap PRT. Lita Anggraini Koordinator Nasional Jala-PRT (2017, wawancara) menegaskan bahwa dalam perspektif zero violence, bahkan satu kasus yang terjadi sesungguhnya merupakan persoalan serius, maka urgensi atas pentingnya payung hukum yang memberikan perlindungan pada PRT seharusnya tidak didasarkan pada banyaknya kasus yang muncul atau dilaporkan. Namun dengan berpijak pada prinsip kesejahteraan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Sementara di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diajukan sejak tahun 2004 hingga kini belum juga berhasil diundangkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 yang memandatkan pekerjaan yang layak bagi PRT. Mandat ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya tujuan ke delapan yakni mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja. Untuk itu kajian JP94 mengupas hasil studi terkait upaya PRT untuk memberdayakan diri, posisi pemberi kerja terhadap PRT, peran media dalam proses advokasi, posisi PRT dalam politik gender Orde Baru, upaya pengorganisasian PRT, proses pengesahan Perda PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta, kontribusi PRT pada kesejahteraan anak dan situasi kerja PRT terkait kekerasan dan diskriminasi yang dialami. Sementara pengalaman terkait proses advokasi RUU Perlindungan PRT kami angkat lewat wawancara dengan Koordinator Nasional Jala PRT, Lita Anggraini dan Kepala Penasihat Teknis Proyek *Promote* ILO Arum Ratnawati. Dokumentasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya payung hukum perlindungan PRT.

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto
(Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Indonesia)

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 197-190, 19 daftar
pustaka

In Indonesia, female migrant domestic workers' representations tend to contain negative meanings. Although they are named as "heroes of development", but their position is nothing more than a commodity for the country. Such treatment makes female migrant domestic workers becomes vulnerable to violence and exploitation by employers, agents, and government staff. Nevertheless, there is an alternative narrative that is rarely highlighted in literature or media, namely the representation of female migrant domestic workers as powerful actors. This paper seeks to fill in that alternative narrative by highlighting the agencies did by these six female migrant domestic workers. The author believes that by using the standpoint feminism perspective to analyze the struggle of these six female migrant domestic workers in empowering themselves after the oppression, it can be seen that agency has been manifested by female migrant domestic workers during the migration process. This study reveals the efforts of female migrant domestic workers to manifest their empowerment through migration decisions in the middle of patriarchal structures, their ability to resist structures with activism, and become agents of development and change for their communities.

Keywords: migration, female migrant domestic workers, standpoint feminism, agency, empowerment

Di Indonesia, representasi perempuan PRT migran cenderung mengandung pemaknaan negatif. Meskipun mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa, namun posisi mereka tidak lebih dari sebuah komoditas bagi negara. Perlakuan seperti ini membuat para perempuan PRT migran rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi oleh majikan, agen penyalur, maupun staf pemerintah. Meski demikian, terdapat narasi alternatif yang jarang disorot dalam literatur maupun media, yaitu representasi perempuan PRT migran sebagai aktor yang berdaya. Tulisan ini berupaya untuk mengisi narasi alternatif tersebut dengan menyorot agensi yang dilakukan enam perempuan PRT migran. Penulis percaya bahwa dengan menggunakan perspektif *standpoint feminism* untuk menganalisis perjuangan enam perempuan pekerja rumah tangga migran ini dalam memberdayakan diri mereka sendiri setelah menghadapi penindasan, maka dapat dilihat bahwa agensi telah dimanifestasikan oleh perempuan PRT migran selama proses migrasi. Penelitian ini mengungkap upaya perempuan PRT migran memanifestasikan keberdayaan mereka melalui keputusan bermigrasi di tengah struktur patriarkis, kemampuan mereka melawan struktur dengan aktivisme, serta menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

Kata kunci: migrasi, perempuan PRT Migran, *standpoint feminism*, agensi, keberdayaan

Ida Ruwaida (Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 191-200, 2 gambar,
2 tabel, 6 daftar pustaka

This article is based on the study on knowledge, attitude, and practice regarding the rights and protections of domestic workers (PRTs) in three cities (Surabaya, Makassar, and Bandung). This paper tries to describe working conditions of PRT, not from the eyes or viewpoint of PRTs, but from their employers. The interesting findings is the tendency of double standards among employers when they faced the social aspects of their relations with PRTs will be transformed into economic ones by promoting the decent work conditions of PRTs. It means domestic workers should be recognized as worker, like others, and their rights will be fulfilled and protected. Assuming the protection of domestic workers is a manifestation of social development, in Indonesian context, the structural intervention through state policy will be conflicted with the social cultural as well as historical aspects of PRTs. Therefore, the study indicates that there is a need to develop social process as apart of cultural intervention for building an equal relationship between domestic workers and their employers.

Keywords: decent work, protection of domestic workers, social relations, economic relations, social development, structural intervention, cultural intervention.

Artikel ini berbasis hasil studi di Kota Surabaya, Makassar, dan Bandung tentang pengetahuan, sikap serta praktik menyangkut hak dan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT), baik dari kacamata PRT dan juga majikan. Kebaruan tulisan ini karena berfokus pada majikan baik PRT dewasa maupun anak. Aspek yang menarik adalah adanya kecenderungan standar ganda di kalangan majikan ketika dihadapkan pada situasi relasi kerja yang selama ini berkembang antara majikan dan PRT, dari yang lebih bersifat sosial menjadi relasi ekonomi (kerja) yang layak bagi PRT. Dalam arti, PRT bukan saja diakui hak-haknya sebagai pekerja, sebagaimana pekerja lainnya, tetapi juga terlindungi. Dengan mengasumsikan upaya perlindungan PRT adalah wujud pembangunan sosial, maka untuk konteks Indonesia, intervensi struktural melalui kebijakan negara dalam mengondisikan kerja layak bagi PRT akan alot dan berhadapan dengan aspek kultural. Temuan studi di ketiga kota menunjukkan bahwa diperlukan proses sosial yang panjang, terarah, dan terpadu, dalam membangun relasi yang setara dan berkeadilan antara PRT dan Majikan.

Kata kunci: kerja layak, perlindungan PRT, relasi sosial, relasi ekonomi, pembangunan social, intervensi struktural, intervensi kultural.

Mary Austin (Centre for Gender Studies, School of African and Oriental Studies, University of London, Inggris)

Menantang Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the campaign for domestic worker legislation in Indonesia

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 201-213, 3 tabel, 37 daftar pustaka

This article examines a recent ILO funded project designed to engage more Indonesian journalists and media organizations in advocacy journalism on behalf of domestic worker legislation. Applying Ann Stoler's notion of 'disregard' in the context of post-Suharto democratization, I illustrate how established newsroom practices and patterns of reporting helped maintain distinctions between 'home' and overseas domestic workers which impeded progress towards comprehensive legislation. Indonesia's endorsement of the adoption of ILO Convention 189 in June 2011 opened up political opportunities, provided a framework for re-scripting media narratives and encouraged journalists to give more space to domestic workers' voices. At the same time, increased media coverage enabled those opposed to legislation to reiterate a gendered disregard for the social and economic value of domestic work.

Key words: advocacy journalism, domestic workers, Indonesia, disregard, victim narratives

Artikel ini mengkaji tentang program ILO terbaru yang dirancang untuk melibatkan para jurnalis dan organisasi-organisasi media Indonesia dalam jurnalisme advokasi perihal Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Dengan menerapkan gagasan Ann Stoler tentang "pengabaian" dalam konteks demokratisasi pasca Suharto, saya menggambarkan bagaimana praktik-praktik ruang media dan pola pemberitaan yang mapan membantu mempertahankan perbedaan antara pekerja rumah tangga "dalam negeri" dan pekerja rumah tangga "luar negeri" yang menghambat kemajuan undang-undang yang komprehensif. Dukungan Indonesia terhadap implementasi Konvensi ILO 189 pada bulan Juni 2011 membuka peluang politik, menyediakan kerangka kerja untuk menuliskan kembali narasi-narasi media dan mendorong para jurnalis untuk memberi lebih banyak ruang bagi suara pekerja rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, liputan media yang meningkat memungkinkan mereka yang menentang undang-undang untuk mengulangi pengabaian berbasis gender terhadap nilai sosial dan ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Kata kunci: jurnalisme advokasi, pekerja rumah tangga, Indonesia, pengabaian, narasi korban

Diah Irawaty (Departemen Antropologi, State University of New York [SUNY] Binghamton, New York, United States)

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 215-226, 56 daftar pustaka

As a political control over women to enforce them to follow state's narrative of ideal women, the New Order regime produced and applied two contradictory forms of gender politics. On the one hand, Soeharto campaigned for state maternalism that promotes fulltime

women's role in domestic sphere. These women were claimed to be the pillar of the nation. On the other hand, the government endorsed the politics of developmentalism that carried out women in development and enforced women's participation in the national development agendas. Women were encouraged to leave their homes and abandon their families. How was this contradictory gender politics produced, reproduced and applied toward female domestic workers? What were social-political contexts behind the deployment of this political approach? What are the implications of this politics to the situations of women's domestic workers?

Keywords: Gender Politics, Developmentalism, International Division of Labor, Sexual/ Reproductive Division of Labor

Sebagai upaya politik menundukkan warga negara perempuan agar menuruti narasi negara tentang perempuan model (ideal women), pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memproduksi dan menerapkan dua bentuk politik gender yang tampak kontradiktif dan paradoks. Di satu sisi, Soeharto mempropagandakan ideologi ibu tradisional (*state maternalism*) sebagai bentuk ideal menjadi ibu yang baik, yang berperan penuh (*full time*) dalam kerja-kerja domestik. Mereka diklaim sebagai tiang negara. Di sisi lain, pemerintah menerapkan politik developmentalisme atas dasar perspektif *women in development*, mengkapanyekan partisipasi perempuan dalam agenda pembangunan nasional. Perempuan didorong untuk keluar dari rumah, bahkan bersedia meninggalkan keluarga. Bagaimana kontradiksi dua pendekatan politik ini diterapkan pada pekerja rumah tangga? Konteks sosial-politik apa saja yang melatarbelakangi pendekatan kedua strategi politik tersebut? Apa implikasinya bagi pekerja rumah tangga perempuan?

Kata kunci: Politik Gender, Developmentalisme, Pembagian Kerja Internasional, Pembagian Kerja Seksual/Reproduksi

Purnama Sari Pelupesty (Mitra Imadei, Jakarta)

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 227-237, 1 gambar, 3 tabel, 17 daftar pustaka

This paper discusses the situation of domestic workers (PRT) and the process of organizing domestic workers that has been doing by the author as a community organizer. The author, with a feminist framework, explores the history of the oppression of women attached to unpaid domestic work and the impact it has on domestic workers who are currently underpaid. This article also discusses the attitude of the state in viewing domestic workers as workers, as citizens and as women as well as the state's reluctance to ratify the ILO Convention No 189 or ratify the Domestic Workers Protection Bill. The author uses her experience and knowledge in the labor movement and is enriched with the distinctive characteristics of domestic workers. This study concludes that efforts to change the working situation experienced by domestic workers need to be done by organizing domestic workers to have the power to urge the state to realize decent work.

Key Words: Female domestic workers, domestic workers union, decent work, Domestic Workers Protection Bill

Tulisan ini membahas situasi pekerja rumah tangga (PRT) dan proses pengorganisasian PRT yang sedang dijalankan oleh penulis sebagai community organizer. Penulis, dengan kerangka feminisme, menggali sejarah penindasan terhadap perempuan yang dilekatkan dengan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar dan imbasnya terhadap pekerja rumah tangga yang dibayar dengan nilai rendah saat ini. Artikel ini juga membahas sikap negara dalam melihat PRT sebagai pekerja, sebagai warga negara dan sebagai perempuan juga keengganan

negara untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 atau mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Penulis menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam gerakan buruh dan diperkaya dengan karakteristik yang khas dari pekerja rumah tangga. Kajian ini menyimpulkan upaya mengubah situasi kerja yang dialami PRT perlu dilakukan dengan mengorganisasi PRT agar memiliki kekuatan untuk mendesak negara mewujudkan kerja layak.

Kata Kunci: Perempuan PRT, serikat PRT, kerja layak, RUU PPRT

Sargini, Jumiyem, Muryanti (Serikat Pekerja Rumah Tangga [SPRT] Tunas Mulia, Yogyakarta, Indonesia)

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 239-247, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This paper examines the legislation process of Proposed Regional Regulation on Domestic Workers (Raperda PRT) in DIY. The regional regulation becomes important because domestic workers have a significant role for working family and for those who are busy with public life. This resulted in an increased demand for this profession every year. Unfortunately, the absence of governing regulation for this profession lead to the use of a very unclear and messy working relationship practice by the DW (PRT) and the customer (service user). The violation of employment relationship becomes regular occurrence, as well as the violence experienced by domestic workers, whether physical, psychological, economic, sexual or social. In Yogyakarta, the Domestic Workers Protection Network (JPPRT) of DIY has suggested that the various type of violence experienced by domestic workers can not be separated from the absence of regulation that governing the working relation of domestic workers and service user. Against this background JPPRT decided to pioneer and propose a draft for regional regulation for domestic workers in The Special Region of Yogyakarta (DIY).

Keywords: domestic workers protection, Proposed Regional Regulation on Domestic Workers, Domestic Workers Protection Network (JPPRT), political support

Tulisan ini mengkaji proses perjalanan legislasi Raperda PRT di DIY. Raperda PRT penting karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki peran penting bagi keluarga yang bekerja atau beraktivitas di wilayah publik. Hal ini menyebabkan kebutuhan atas PRT terus meningkat setiap tahun. Sayangnya peningkatan jumlah PRT tersebut tidak dibarengi dengan adanya aturan tentang pekerjaan domestik yang semakin rumit pada konteks ini. Ketiadaan pengaturan hubungan kerja domestik ini menyebabkan pengguna jasa dan PRT menggunakan metode, adat dan cara sendiri dalam menjalankan hubungan kerja rumah tangga. Implikasinya pelanggaran hubungan kerja menjadi sangat relatif, begitu juga kekerasan yang dialami oleh PRT, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun sosial juga bersifat relatif. Di Yogyakarta, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY memiliki pemikiran bahwa berbagai macam kekerasan yang menimpa PRT tersebut tidak bisa dipisahkan dari tiadanya peraturan yang mengatur hubungan kerja PRT dan pengguna jasa. Terkait hal tersebut, JPPRT mulai merintis dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bagi PRT di DIY.

Kata kunci: perlindungan PRT, Raperda PRT, JPPRT, dukungan politik

Maria Ulfah Anshor (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], Jakarta, Indonesia)

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 249-260, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This article is part of dissertation research on childcare of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) in pesantren, using a qualitative approach and analysis unit in child and their environment. This study uses the ecological system theory of Bronfenbrenner and the concept of Global Care Chain with the perspective of child protection. The results showed that the children of TKIP who abandoned by their mothers abroad became losing care, disrupted their social welfare psychically and socially; there is interdependence between the child's of TKIP and his/her family with TKIP abroad; pesantren is an option for TKIP family because there is no professional childcare for the children of TKIP when their mother abandons her/him. Institutionally pesantren has potential to break the Global Care Chain injustice on the care of TKIP children with the support of religious values and traditions of pesantren. However, policy support is needed to ensure the care and social welfare of TKIP's children that based on community and which integrated comprehensively in blueprint of Indonesian migrant worker policy.

Keywords: Childcare migrant worker, child rights and child welfare

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertasi mengenai pengasuhan anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) di pesantren, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis pada anak dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner dan konsep Global Care Chain dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi kehilangan pengasuhan, terganggu kesejahteraan sosialnya secara psikis dan sosial; ada saling ketergantungan antara anak TKIP dan keluarganya dengan TKIP di luar negeri; pesantren menjadi pilihan bagi keluarga TKIP karena tidak tersedia pengasuhan anak yang profesional bagi anak TKIP ketika ditinggal ibunya ke luar negeri. Pesantren secara institusi berpotensi memutus ketidakadilan Global Care Chain atas pengasuhan anak TKIP dengan dukungan nilai-nilai agama dan tradisi pesantren. Akan tetapi dibutuhkan dukungan kebijakan yang menjamin pengasuhan dan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP yang berbasis komunitas dan yang terintegrasi secara komprehensif dalam blue print kebijakan TKI.

Kata kunci: Pengasuhan anak TKIP, hak anak dan kesejahteraan anak

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 261-271, 15 daftar pustaka

This paper focuses on the experience of domestic workers who experience violence, discrimination and neglect of rights committed by employers as well as management of apartments where domestic workers work. From the data of six domestic workers with diverse backgrounds who were interviewed in depth, it can be revealed that

every domestic worker has experienced violence during work. There are forms of violence that can be easily recognized as violence, but there is also some discrimination and violence that are not viewed as violence or are considered fairness. This type of discrimination and violence is usually associated with inappropriate work situations. The vulnerability situation faced by domestic workers because of the scope of their work in this private domain is an implication of the absence of laws protecting domestic workers in carrying out their work. Therefore, the existence of law as an umbrella law of domestic workers protection as well as other workers becomes a fundamental requirement.

Keywords: violence, discrimination, abandonment of rights, bill on domestic worker protection

Tulisan ini berfokus pada pengalaman pekerja rumah tangga (PRT) yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi dan pengabaian hak yang dilakukan oleh pemberi kerja juga manajemen apartemen tempat

PRT bekerja. Dari data enam PRT dengan latar belakang yang beragam yang bekerja pada pemberi kerja warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang diwawancara secara mendalam, dapat diungkap bahwa setiap PRT pernah mengalami kekerasan selama bekerja. Terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dengan mudah dikenali sebagai kekerasan, namun terdapat juga sejumlah diskriminasi dan kekerasan yang tidak dipandang sebagai kekerasan atau dianggap sebagai kewajiban. Diskriminasi dan kekerasan jenis ini biasanya terkait dengan situasi kerja yang tidak layak. Situasi kerentanan yang dihadapi PRT karena lingkup pekerjaannya berada di ranah privat ini merupakan implikasi dari belum adanya undang-undang yang melindungi PRT dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu keberadaan undang-undang sebagai payung hukum perlindungan PRT seperti halnya pekerja lain menjadi kebutuhan mendasar.

Kata kunci: kekerasan, diskriminasi, pengabaian hak, RUU Perlindungan PRT

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare

Maria Ulfah Anshor

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

mariaulfah_anshor@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 5 Juli 2017, direvisi 22 Juli 2017, diputuskan diterima 31 Juli 2017

Abstract

This article is part of dissertation research on childcare of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) in pesantren, using a qualitative approach and analysis unit in child and their environment. This study uses the ecological system theory of Bronfenbrenner and the concept of Global Care Chain with the perspective of child protection. The results showed that the children of TKIP who abandoned by their mothers abroad became losing care, disrupted their social welfare psychically and socially; there is interdependence between the child's of TKIP and his/her family with TKIP abroad; pesantren is an option for TKIP family because there is no professional childcare for the children of TKIP when their mother abandons her/him. Institutionally pesantren has potential to break the Global Care Chain injustice on the care of TKIP children with the support of religious values and traditions of pesantren. However, policy support is needed to ensure the care and social welfare of TKIP's children that based on community and which integrated comprehensively in blueprint of Indonesian migrant worker policy.

Keywords: Childcare migrant worker, child rights and child welfare.

Abstrak

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertasi mengenai pengasuhan anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) di pesantren, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis pada anak dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner dan konsep *Global Care Chain* dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi kehilangan pengasuhan, terganggu kesejahteraan sosialnya secara psikis dan sosial; ada saling ketergantungan antara anak TKIP dan keluarganya dengan TKIP di luar negeri; pesantren menjadi pilihan bagi keluarga TKIP karena tidak tersedia pengasuhan anak yang profesional bagi anak TKIP ketika ditinggal ibunya ke luar negeri. Pesantren secara institusi berpotensi memutus ketidakadilan *Global Care Chain* atas pengasuhan anak TKIP dengan dukungan nilai-nilai agama dan tradisi pesantren. Akan tetapi dibutuhkan dukungan kebijakan yang menjamin pengasuhan dan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP yang berbasis komunitas dan yang terintegrasi secara komprehensif dalam *blue print* kebijakan TKI.

Kata kunci: Pengasuhan anak TKIP, hak anak dan kesejahteraan anak.

Pendahuluan

Pekerja migran perempuan merupakan fenomena global, tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di sejumlah negara seperti Amerika Latin, Srilanka, Filipina, negara-negara di Afrika, dan sebagainya. BNP2TKI (2012) menyebutkan jumlah TKI yang berada di luar negeri di berbagai negara pada tahun 2012 sekitar 7 juta TKI, 80 persennya (5,6 juta) adalah perempuan, bekerja di sektor rumah tangga, rata-rata usia produktif berkisar antara 18-40 tahun. Pada rentang usia tersebut, berkait erat dengan masa reproduksi, antara lain mereka berkeluarga dan memiliki anak. Penelitian Hondagneu-Sotelo dan Avila (1997) pada pekerja migran perempuan di Amerika Latin (Meksiko, El Salvador dan Guatemala), dari 153 pekerja domestik yang disurvei 75 persen di antara mereka

memiliki anak. Studi lain di Srilanka menyebutkan bahwa dari 217 responden, 62 persen rata-rata memiliki 1-2 anak, 40 persen lainnya memiliki tiga anak dan hanya 10 persen yang memiliki empat anak lebih (Ukwatta 2010). Menurutny, lebih dari 80 persen pekerja rumah tangga migran perempuan asal Srilanka bekerja merawat anak, selain melakukan pekerjaan lain seperti membersihkan rumah dan memasak.

Dari sisi pendidikan dan keterampilan, mereka sebagian besar pendidikan formalnya rendah dengan keterampilan yang sangat terbatas (BNP2TKI 2009). Temuan studi Irianto (2011) di Uni Emirat mengonfirmasi hal tersebut yaitu dari 57 orang yang berada di rumah aman di Abu Dhabi sekitar 90 persen di antara mereka lulusan Sekolah Dasar, 8 di antara mereka buta

huruf. Menurutnya, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan relasi kuasa antara majikan sebagai subjek yang kuat dalam menentukan isi kontrak, dengan perempuan pekerja migran sebagai objek yang lemah, sehingga mereka tidak terlindungi. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) ke luar negeri secara ekonomi, berkontribusi pada peningkatan penghasilan tidak hanya bagi TKIP dan keluarganya tetapi menyumbangkan devisa bagi negara dalam jumlah puluhan triliun rupiah setiap tahun, bahkan mereka mendapat julukan pahlawan devisa. Sebagai gambaran, pada tahun 2006 dari TKI menghasilkan devisa sebesar 5,6 miliar US Dolar, empat tahun kemudian pada 2010 meningkat menjadi 7,1 miliar dollar AS (BNP2TKI 2012), tidak termasuk gaji pekerja yang dibawa langsung saat pulang maupun yang ditiptkan pada kerabat dekat. Contohnya, di tingkat lokal, PT. Pos mencatat Indramayu sebagai salah satu kabupaten basis pengirim TKI (*sending area*) menerima kiriman uang (*remittance*) dari TKI perbulan rata-rata mencapai 100 miliar rupiah (Rosadi 2010).

Dalam konteks Indramayu sebagai daerah pengirim TKIP, pada tahun 2011 sebanyak 29.966, tahun 2012 sebanyak 28.524 dan tahun 2013 sebanyak 28.410 TKI dari sekitar 550 ribu penempatan TKI setiap tahun (BNP2TKI 2013). Fenomena di negara pengirim termasuk di antaranya di daerah kantong-kantong pengirim di Indramayu, hidup dalam keluarga dengan satu orang tua pergi untuk waktu yang lama merupakan pengalaman masa kecil yang normal bagi banyak anak (pekerja migran). Mereka hidup dengan kakek-nenek, bibi, kakak, perawatan selain keluarga atau lembaga (Jespersen 2012). Sejumlah studi terdahulu menyebutkan bahwa pengasuhan anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri sebagian besar dilakukan oleh keluarga seperti nenek, tante atau saudara perempuan dan suami pekerja migran perempuan (Rosadi 2010; Kustini 2012), pihak lain yang tidak memiliki hubungan keluarga yang dibayar atau mengerjakannya secara sukarela (Aryani 2012), namun tidak ada jaminan bahwa mereka melakukannya secara profesional. Hal tersebut terkonfirmasi dengan studi terdahulu di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, yang menyebutkan fenomena anak telantar yang ditinggal ibunya mereka memerlukan pengasuh yang profesional (Rosadi 2010).

Dampak pekerja migran perempuan pada perkembangan anak mereka yang ditinggal ibunya ke luar negeri dalam waktu yang lama, secara umum mereka mengalami tekanan psikologis seperti mengalami dilema pengasuhan oleh nenek atau ibu pengganti (*substitute mother*) (Hondagneu-Sotelo & Avila 1997);

anak mengalami kesepian dan problem sosial yang kompleks hingga menimbulkan semacam kepanikan moral dalam diri mereka (Parrenas 2001); anak kurang terawat (*care deficit*) (Hochschild 2001); anak mereka mengalami masalah sosial yang kompleks seperti rendah diri, mudah marah, depresi dan mudah terlibat dalam perilaku kekerasan sehingga rentan mendapat perlakuan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual (Ukwatta 2010); ibu pengganti tidak profesional (Rosadi 2010). Temuan tersebut memperkuat studi sebelumnya pada konteks global di beberapa negara pengirim pekerja migran perempuan, di antaranya anak telantar, kehilangan pengasuhan, sementara suami tidak merawat anaknya (Parrenas 2005); mengalami disintegrasi keluarga 'tradisional', bahkan anak-anak mengalami kehidupan dramatis seperti kehamilan remaja, konsumerisme merajalela di kalangan generasi muda, bergabung dengan geng kekerasan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, tidak berprestasi di sekolah, krisis perawatan oleh nenek (Bastia 2009); anak mengalami gizi buruk, pendidikan terganggu, berbeda dibanding bapaknya yang menjadi pekerja migran, anak yang ditinggal lebih bisa diawasi dan dilindungi oleh ibunya (Bakker, Elings-Pels & Reis 2009). Begitu juga laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa anak yang ditinggalkan ibunya sebagai pekerja migran bermasalah pada perkembangan fisik, psikis, sosial, dan rentan melakukan tindakan yang membuatnya berhadapan dengan hukum, dan ketidakhadiran ibu juga menyebabkan rendahnya performa anak di sekolah (UNESCAP 2008).

Mengacu pada berbagai studi terdahulu sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa anak pekerja migran perempuan yang ditinggal ibunya ke luar negeri, mereka mengalami masalah sosial yang kompleks baik fisik, psikis maupun sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, informannya adalah anak TKIP yang tinggal di pesantren dengan kriteria ketika ditinggal ibunya pertama kali ke luar negeri berusia balita, sebanyak 21 anak. Lokasi penelitian di 3 (tiga) pesantren di kabupaten Indramayu yaitu pesantren Cadangpinggan, pesantren As Sakienah, pesantren Darus Salam. Fokus penelitian pada permasalahan pengasuhan anak TKIP yang tinggal di pesantren, sejauhmana nilai-nilai agama Islam dan tradisi serta kebijakan mendukung pesantren sebagai lembaga pengasuhan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan anak TKIP? Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis pengasuhan anak TKIP dalam penelitian ini adalah teori lingkungan perkembangan manusia (*The Ecology of Human Development*) dari Bronfenbrenner (1997)

dankonsep *Global Care Chain* (GCC) dari Hochschild (2001).

Menurut Bronfenbrenner (1997), perkembangan manusia didefinisikan sebagai sebuah perubahan yang berkelanjutan yakni seseorang merasakan pertumbuhannya dan berhubungan dengan lingkungannya, sebagaimana disebutkan: "...development is defined in this work as a lasting change in the way in which a person perceives and deals with his environment" (Bronfenbrenner 1979, p. 3). Adapun sistem lingkungan yang ditawarkannya, secara umum digambarkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh sistem interaksi yang kompleks dalam berbagai tingkatan yang saling memengaruhi. Dalam konteks (*contexts*) perkembangan lingkungan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari lima subsistem sosial yang membantu mendorong dan menuntun pertumbuhan seseorang, mulai dari sistem mikro berupa hubungan antara seseorang (anak) yang sedang berkembang dengan lingkungan yang terdekatnya seperti keluarga, sekolah, teman sebaya hingga menuju ke sistem makro dalam skala yang lebih luas. Kelima level subsistem tersebut adalah *microsystem*, *mesosystem*, *exosystem*, *macrosystem* dan *Chronosystem* (Bronfenbrenner, 1994).

Sementara konsep *global care chain* prinsipnya memulai kekuatannya dari sebuah negara miskin dan berakhir di sebuah negara kaya, sebagaimana layaknya perdagangan internasional bidang pekerja rumah tangga (*domestic workers*) dalam sebuah rangkaian bisnis yang saling terhubung. Dalam beberapa rantai perawatan mereka bergerak secara individu dari desa ke kota di suatu negara miskin kemudian langsung terhubung dengan negara kaya, namun pada bagian lain dari negara miskin tidak langsung terhubung menuju negara kaya tetapi melalui perantara negara lain (Hochschild 2001). Menurutnya, dalam konsep *global care chain* pada *link* pertama saudara perempuan tertua dari sebuah keluarga miskin di negara dunia ketiga mengasuh (anak) saudara-saudaranya (*the first link in the chain*). Di sisi lain seorang ibu bekerja merawat dan mengasuh anak dari pekerja migran (*the second link*) sementara ibu dari anak-anak pekerja migran tersebut bekerja merawat anak pada sebuah keluarga di negara kaya (*the final link*).

Untuk melampiaskan kerinduan pada anak-anaknya ketika ibunya berada di luar negeri di antaranya dikompensasi dengan mengalihkan kasih sayang kepada anak majikan yang diasuhnya (Parrenas 2001; Hochschild 2001). Pengalihan kasih sayang tersebut, menurut Hochschild (2001) dapat diartikan anak majikan telah mengambil alih kasih sayang dari pekerja migran

perempuan yang seharusnya diberikan terhadap anaknya yang berada di negara miskin. Dengan kata lain, anak majikan yang dirawat perempuan pekerja migran di negara kaya itu mengalami "*surplus*" kasih sayang, sebaliknya anak-anak mereka yang ditinggalkan di negara asal mengalami "*deficit care*". Hal tersebut menurutnya menimbulkan ketidakadilan dalam pemerataan perawatan bagi anak pekerja migran perempuan di negara miskin. Bahkan menurutnya, migrasi pekerja migran perempuan dari negara miskin ke negara kaya dalam fenomena *global care* tersebut tidak ada bedanya dengan konsep kapitalis sebagaimana Amerika Serikat mengimpor emas, tembaga, seng dan lainnya dari negara dunia ketiga di masa lalu (Hochschild 2001).

Teori Bronfenbrenner (1997, 1994) dan konsep *Global Care Chain* (Hochschild, 2001) tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan anak selama dalam pengasuhan oleh orang tua pengganti dan implikasinya pada kesejahteraan anak. Pembahasan dalam artikel ini penulis batasi pada hasil penelitian yang kebetulan terkait dengan tema *Jurnal Perempuan* edisi 94 yaitu kontribusi TKIP pada keluarga khususnya kesejahteraan anak. Terkait hal tersebut, pembahasannya meliputi empat hal yaitu; peran dan kontribusi TKIP terhadap kesejahteraan keluarga; bentuk pengasuhan anak TKIP dan dinamikanya; relasi anak dengan ibunya di luar negeri; implikasi pengasuhan jarak jauh pada kesejahteraan anak.

Peran dan Kontribusi TKIP terhadap Kesejahteraan Keluarga

Fenomena pekerja migran perempuan ke luar negeri menunjukkan ada pergeseran peran gender yang semula istri secara ekonomi bergantung pada suami telah berubah menjadi pencari nafkah utama untuk menyelamatkan ekonomi keluarga dengan berbagai risiko. Salah satu risiko berbahaya namun dianggap lumrah adalah meninggalkan anak-anak bahkan masih bayi tanpa ada jaminan pengasuhan. Dari sisi ekonomi peran TKIP sangat besar sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Faktor pendorong bagi sebagian besar TKIP adalah kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri yang bisa menjadi sumber penghidupan keluarga. Sebagian di antarpengalaman mereka sebagai berikut:

- Karena tuntutan ekonomi terpaksa anak ditinggalkan

Pengalaman seorang mantan TKIP di Saudi, sebelum bekerja ke luar negeri ia bekerja sebagai pencuci pakaian

tetangganya, ia kemudian bekerja ke luar negeri karena tidak ada pilihan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, sebagaimana diceritakan: "...*ya arep menggawe apa orah baka dudu miyang meng Arab, arep dagang modal bli duwe... semono gah bisane miyang mana kuh dibantu ning Pak Guru ya- ya mau kerja apa di sini kalau bukan keluar negeri, mau berdagang tidak punya modal, bisa berangkat juga karena dibantu Pak Guru (sambil menunjuk tetangga di depan rumahnya yang menjadi sponsor TKI)"* (Sn 2014, wawancara 18 Mei)

- Terbelit utang dan posisi sebagai anak sulung mengalahkan hak anaknya

Suami TKIP menceritakan bahwa yang mendorong istrinya menjadi TKIP karena keluarganya terbelit utang, bahkan ketika istrinya menjadi TKIP mereka pun tidak terpikirkan mengenai dampaknya pada pengasuhan bayi yang ditinggalkannya, sebagaimana diceritakan:

"...*ya karena keadaan, dadi awite wong wadon mangkat luh... kebetulan duwe utang, kita kuh usaha duwe utang rong puluh juta, alhamdulillah pur kabeh mangkat pertama kuh. Nah waktu kuen iku, wis... balik orah, tp keadaan konon sih lah... kita karo wong wadon luh pembarep kabeh, dadi ya posisie keluarga kita ya ditunjang sing kita, sing wadon ditunjang sing wadon" – asal mulanya istri saya menjadi TKIP ke luar negeri itu kronologinya karena usaha saya terbelit utang sebanyak 20 juta, tidak bisa membayar tapi Alhamdulillah lunas semua dari hasil kerja pemberangkatan pertama. Kemudian pulang... namun keadaan yang mengharuskan istri saya berangkat lagi ke luar karena saya dan istri saya keduanya sebagai anak sulung yang masing-masing membiayai keluarganya. (Fr 2013, wawancara 14 Oktober)*

- Suami menganggur, anak 'disapih'

Suami tidak bisa melarang kemauan istri, karena ia miskin dan pengangguran, sebagaimana diungkapkan Wir berikut:

"*Karepe kula kuh...mengko dicit aja gerek lunga masih duwe anak cilik. Nah akhire wong wadon kulane ngrocok, pengene... ya wis ayuh... alhamdulillah dikabul. Sekitar karo tengah tahun, ya emboke mangkat... durung rong taun dipegot. Ya kuwen sih barange mah kenang ekonomi... pengen kayak batur, pengen deduwehan ka bu... Dadi ya kepriwe orah wonglanang ning kene, kader gah wong belih duwe, pengangguran. Dadi ya belih ngijinken apamaning orah."* –menurut saya nanti dulu, jangan berangkat dulu karena masih punya bayi, tapi istri saya keinginannya sudah bulat... ya sudah, alhamdulillah diterima, jadi sekitar umur 1,5 tahun ditinggal ibunya berangkat, belum dua tahun diputus ASInya. Ya... itu karena terdesak ekonomi...ingin seperti orang lain, ingin memiliki sesuatu lah bu... jadi gimana lagi... saya sebagai suami orang miskin,

pengangguran...mau apa kalau tidak mengizinkan. (Wir 2013, wawancara 13 Oktober)

- Penghasilan keluarga tidak cukup, ingin hidup seperti tetangga

Motivasi TKIP lain meninggalkan anak bayi untuk bekerja ke luar negeri karena ingin hidup kaya seperti teman-teman dan tetangganya di kampung, sebagaimana diungkapkan TKIP berikut: "*ya pengen sugih kaya batur... bisa mandiri karena suami wong bli duwe, anak-anak pengen sukses sekolahnya, bisa sekolah tinggi. sebenere mah bapane bocahku kuh kerja tapi ya bli cukup sih pribe? –ya ingin kaya seperti orang lain, bisa mandiri karena suami orang miskin, ingin anak-anak sukses sekolahnya, bisa sekolah tinggi. Sebetulnya suami itu kerja tapi gajinya tidak cukup, bagaimana?"* (Rs 2014, wawancara 6 September).

Para TKIP pada umumnya mengirimkan sebagian atau bahkan seluruh penghasilan yang mereka dapatkan untuk keperluan hidup keluarganya. Hal tersebut di antaranya merupakan strategi bagi TKIP untuk mempertahankan hubungan dengan anak-anak dan keluarganya. Uang yang diperoleh dari kiriman TKIP sebagian besar digunakan untuk membayar utang kepada sponsor, kebutuhan keluarga, menggadai sawah, renovasi rumah, membeli perabotan rumah, berbagi kepada nenek dan sebagainya. Bahkan tidak jarang uang kiriman diselewengkan untuk kepentingan lain seperti membayar utang pamannya, membiayai kebutuhan saudara-saudara dan sebagainya. Secara rinci gambarannya sebagai berikut:

- Membayar utang kepada sponsor, menggadai sawah, renovasi rumah dan membeli perabot rumah

Pengalaman mantan TKIP memanfaatkan uang penghasilan dari luar negeri sebagaimana diceritakan berikut ini:

"*Porod kawitan sewulan dipai 600 real, ping pindone sewulan oli 800 real tapi dicoplok gaji telung wulan go bayar utang ning sponsor go bayar persiapan mangkat. Tas kuen kuh... toli nembe bisa ngumpulaken go gade sawah orah... digarap wong lanang. Dangdan umah, tuku isi umah, toli ya go bagi-bagi ning mboktua, sedulur orah. Sing miyang terakhir, rong taun kerjae pragat dute pragat go biaya sekolah bocah. Alhamdulillah sing gede wis pragat SMK sekien wis kerja ning Mitsubishi Jakarta" – Periode pertama mendapat upah sebesar 600 real, periode kedua sebesar 800 real. Dipotong tiga bulan untuk membayar utang pada sponsor yang membiayai persiapan pemberangkatan. Setelah itu baru bisa mengumpulkan untuk biaya gadai sawah dikelola oleh suami... untuk renovasi rumah, membeli perabot rumah dan berbagi dengan nenek, saudara*

dan sebagainya. Periode yang terakhir, selama kerja dua tahun, kerja selesai uang habis semua untuk biaya sekolah anak. Alhamdulillah sekarang sudah selesai SMK dan sudah kerja di Mitsubishi Jakarta. (Sn 2013, wawancara 18 Mei)

- Renovasi rumah, membeli motor, TV dan perabot rumah tangga menjadi prioritas

Pengalaman Wir, suami TKIP yang anaknya di Pesantren Cadangpinggan, pengakuannya sebagai berikut:

"Ya iki lih ... gawe umah, toli ya nganggo kebutuhan sejene orah... jare wong wadone kuh pengen kaya batur jeh... ya wis tek ijini, apa karepe wong wadon pengen apa bae ya tek losaken ning kulae... kula ta padu njaluk sisekna go jakat bae, jare ning syareate kan mengkonon orah, jadi ya tak jalanna. ya...alhamdulillah, berkah. Ini mah bukti.. Hahahahaha" –ya ini untuk bikin rumah (telunjuknya sambil diarahkan ke dinding di balik punggungnya), untuk kebutuhan lainnya ... kata istrinya ingin seperti orang lain... saya izinkan saja saya hanya meminta agar disisihkan untuk zakat. Menurut agama kan katanya begitu... saya tinggal melaksanakan, katanya kan barangsiapa yang melaksanakan zakat maka rezekinya akan berkah... alhamdulillah berkah, ini sudah terbukti hahaha (tertawa lepas wajahnya tampak senang sekali). (Wir 2013, wawancara 13 Oktober)

Pengalaman serupa disampaikan suami TKIP berikut: *"Kiriman sing wong wadon kuh rata-rata sewulan ya ana bokat rong jutaan...tapi bli dikirim unggal wulan, telung wulan sepisan... ya lagi kawitane ta kanggo tuku motor, TV, bupet toli ya nggo jajane bocah. Porod maninge bisa dangdan umah karo tuku sawah..."* –kiriman uang dari istri setiap bulan rata-rata sebesar 2 juta, dikirim tiga bulan sekali... waktu pertama berangkat hasilnya digunakan untuk membeli motor, TV, bufet, dan jajan anak-anak. Baru pada periode berikutnya digunakan untuk renovasi rumah dan membeli sawah" (Tm 2014, wawancara 6 September).

- Membayar utang, membiayai saudara dan membiayai sekolah anak-anak

Pengalaman lain untuk membayar utang, membiayai adik-adiknya dan biaya pendidikan anaknya, sebagaimana diceritakan suami TKIP berikut:

"Alhamdulillah bu, gusti Allah maringi rejeki, nganggo bayar utang, membiayai sedulur, jajan bocah, biaya sekolah.. Baka kepindo ning saudi, , adik-adik kita lu ning kene wis nikah kabeh, wong tua ya masih... Ya pas... ya uwong sih akeh sing ngomong bu, mangkat ning arab jeh entok bae. Ya wis bagen. Sing penting kita anak rukun..." – Alhamdulillah bu ... Allah memberikan rezeki, bisa membayar utang, membiayai saudara, untuk uang saku anak-anak, biaya sekolah. Berangkat

kedua kalinya ke Saudi untuk biaya nikah adik-adik, yang di sini sudah menikah semua, orang tua juga masih. Ya impas tidak apa-apa (sambil menunjuk ke sekitar rumahnya berupa bangunan tua, di bagian atap beberapa bagiannya jebol tidak terawat), banyak yang bilang katanya ke Arab tapi selalu habis, ya tidak masalah yang penting anak kami rukun." (Fr 2013, wawancara 14 Oktober)

Dari pengalaman beberapa mantan TKIP sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari majikannya itu dikeluarkan lagi untuk berbagai kebutuhan bahkan di luar kebutuhan dirinya. Mereka berbagi pendapatan secara berlapis (*multi layer sharing*), sebagaimana ditulis Anshor (2017, h. 7) untuk membiayai berbagai kebutuhan keluarganya seperti pendidikan anak, kebutuhan hidup suami, orang tua, saudara, ibu yang mengasuh anaknya dan berbagai kepentingan lainnya. Keluarga mereka bergantung pada kiriman rutin dari penghasilan mereka, namun cara keluarga dalam memanfaatkan uang kiriman belum berorientasi pada jaminan kesejahteraan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak tampak belum menjadi prioritas bagi keluarga TKIP.

Bentuk Pengasuhan Anak TKIP dan Dinamikanya

Kondisi anak TKIP ketika pertama kali ditinggal ibunya ke luar negeri bervariasi. Usia mereka sebagian di antaranya masih bayi dengan rentang usia seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 1,5 tahun hingga 2 (dua) tahun dan balita dengan rentang usia 3-5 tahun. Mereka ditinggal ibunya ke luar negeri dalam waktu yang lama, sebagian besar selama 10 (sepuluh) tahun bahkan di antara mereka ada yang 12 (dua belas) atau lebih. Terkait jumlah saudara atau keluarga, pada anak TKIP yang ditinggal ibunya sejak berusia di bawah 2 (dua) tahun sebagian besar mereka anak tunggal, namun pada anak yang ketika pertama kali ditinggal ibunya berusia di bawah lima tahun (balita) rata-rata memiliki 1-3 orang saudara, namun sebagian di antaranya memiliki 1 orang saudara. Mereka pertama kali menyadari ditinggal ibunya menjadi TKIP ke luar negeri rata-rata pada saat berusia 5-6 tahun, meskipun sebagian besar mereka tidak ingat persisnya usia berapa. Namun pada umumnya mereka menyadari ibunya ke luar negeri ketika pertama kali masuk Sekolah Dasar (SD) karena menyaksikan anak-anak lain di antar dan dijemput oleh ibunya.

Terkait pengasuhan anak TKIP, dari pengalaman mereka dapat dikategorikan menjadi lima bentuk seperti ditulis Anshor (2017, h. 73) yaitu: *pertama*, ayah sebagai pengasuh sekaligus ibu pengganti, ia melakukan pengasuhan dibantu oleh nenek dan keluarga batih;

kedua, nenek sebagai ibu/orang tua pengganti, ia melakukan pengasuhan bersama atau tidak bersama keluarga batih tanpa ayah; *ketiga*, tante atau bibi/uwak sebagai orang tua pengganti, ia melakukan pengasuhan anak tanpa ayah; *keempat*, nenek tiri sebagai orang tua pengganti melakukan pengasuhan bersama keluarganya; *kelima*, pihak lain sebagai orang tua pengganti, mereka melakukan pengasuhan terhadap anak TKIP meskipun tidak memiliki hubungan biologis dengan anak dan kedua orang tuanya. Data tersebut terkonfirmasi dengan pengakuan beberapa mantan TKIP di kecamatan Sliyeg bahwa mereka meninggalkan anaknya dalam usia kurang dari dua tahun dan balita yaitu; di antaranya berusia 2 minggu, 2 bulan, 5 bulan, 11 bulan, 20 bulan, 2 tahun, balita berusia sekitar 4 tahun (NI 2014). Begitu juga pengakuan mantan TKIP di kecamatan lain sebagaimana dikatakan: "Saya waktu berangkat pertama kali ke luar negeri anak saya (Irham) berusia 1,5 tahun, terus ya *dimomong ning* –diasuh oleh—ibu saya" (Sn 2013, wawancara 18 Mei).

Dari pengalaman anak TKIP, mereka mengakui bahwa sebagian besar dari mereka mengalami sekurang-kurangnya dua tipe pengasuhan dari kelima tipe pengasuhan anak TKIP tersebut. Sejak pertama kali ditinggal ibunya ke luar negeri hingga masuk SD atau pada usia 0-6 tahun hampir seluruh anak TKIP diasuh dalam pengasuhan nenek bersama atau tanpa ayah, namun setelah masuk SD di antara mereka tinggal bersama ayah atau pengasuh lain. Hal tersebut menyebabkan terjadi dinamika pengasuhan yang berdampak pada pemenuhan hak dan kesejahteraan mereka terganggu, mereka kehilangan kasih sayang, perhatian, bimbingan, perawatan dari ibu bahkan juga dari ayahnya. Sebagian besar di antara mereka tidak pernah ditengok ayahnya dan di antara mereka tidak mengetahui keberadaan ayahnya (Fn 2013, wawancara 30 Oktober; Ar 2013 wawancara 29 Oktober; Dz 2013, wawancara 29 Oktober; Rb 2014, wawancara 20 Juli). Gambaran mengenai dinamika pengasuhan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Fn, sebagai anak tunggal sering sendirian di rumah

Ayahnya seorang petani, siang hari ia ke sawah, malam hari pun kadang ke sawah menjaga air agar pengairan sawahnya tetap stabil sehingga Fn sering sendirian di rumah, sehinggasinger merasa takut dan teringat ibunya namun ia hanya bisa menangis. Ia pun enggan bercerita kepada ayah dan neneknya, sebagaimana dikatakan: "*baka bengi wedi dewekan ya iloke nangis... kelingan emak... ning jero kamer nangis dewekan... beli lok cerita ning sapa-sapa, ning bapak ya belih lok*

cerita..."—kalau malam takut sendirian suka menangis, ingat ibu... menangis sendirian di dalam kamar, tidak pernah menceritakannya pada siapapun termasuk pada bapak...—(Fn 2013, wawancara 30 Oktober). Hal tersebut dialaminya dalam waktu yang cukup lama, sehingga menurutnya ketidakhadiran ibunya merupakan hal yang biasa saja. Beberapa kali ibunya pulang, namun paling lama satu tahun kemudian pergi lagi. Ia merasakan sekali kehilangan ibunya justru setelah di pondok, ia merasa seperti "iri" manakala melihat teman-temannya ditengok oleh ibunya.

- Ar, diasuh oleh nenek karena ayahnya kabur

Ar sebagai anak tunggal ditinggal oleh ibunya ke luar negeri dalam usia dua bulan, ia diasuh oleh nenek, kakek dan paman atau adik ibunya dengan disiplin ketat, sementara ayahnya kabur tidak lama setelah ibunya keluar negeri. Menurut nenek dan pamannya cukup baik, perhatian, tetapi mereka sangat ketat mengatur jadwal Ar, sehingga kesukaannya bermain bola dibatasi, hanya dari jam 4-5 sore, jam setengah enam sore ia harus bersiap-siap mengaji. Kalau pulang melebihi jam lima neneknya marah, pernah ia membandel pulang malam, mereka memarahinya, bahkan tidak jarang *disabet* (dicambuk). Namun yang menyenangkan kalau sedang ingat ibu, pamannya suka menghibur dengan mengajak jalan-jalan, diteleponkan dan bicara dengan ibu, sebaliknya ibunya sering menelepon melalui HP (*handphone*) pamannya itu (Ar 2013, wawancara 29 Oktober).

- Az, neneknya sangat sayang tapi ayahnya tidak pernah menengok

Az sebagai anak tunggal, sejak ibunya menjadi TKIP ia tinggal bersama neneknya, namun ayahnya tinggal bersama orang tuanya di desa yang berbeda, dan tidak pernah menengok. Beberapa tahun kemudian neneknya meminta kepada ayahnya agar membantu biaya makan anaknya, sebagaimana diceritakan neneknya: "*Matak sing awit cilik mula, pernah tah ngalami mene? Ora lokatan... he sun ari ngaku anak mah, sok mana sumbangan gah.. ngalami mengkonon.. ampe belih mene-mene. Ari mangan ya gona sumbangan....?*"—sejak kecil ditinggal, sama sekali tidak pernah ke sini (menengok)...hingga sekali waktu saya katakan kepadanya "he, kalau masih mengaku anak bantulah...sekadar untuk biaya makan" (Nenek Az 2013, wawancara 13 Oktober). Setelah itu ayahnya sering menengok meskipun jarang memberikan uang jajan karena ia tidak bekerja, sebagaimana dijelaskan: "*Ya kan... bapak mah sering ketemu, bapak kan sering ngeluangin waktu walaupun jarang ngasih uang, soalnya kan gak kerja*

sih...jadi ya seneng-seneng aja kalau ama bapak sih" (Az 2013, wawancara 13 Oktober).

- Rb, dieksploitasi nenek tiri dengan beban kerja seperti orang dewasa

Pengalaman Rb, ditinggal ibunya ke luar negeri sejak ia berusia satu minggu, tinggal bersama nenek tiri dan kakeknya di kampung, sementara ibunya bekerja di kota sebelum akhirnya bekerja di luar negeri. Bersama nenek tirinya, ia ikut berjualan kacang tanah sepulang sekolah, pernah juga ia bekerja di gudang dengan tugas mengangkut kedelai dengan lori—trolibesar berukuran sekitar 2 x 1,5 meter didorong di atas rel yang disediakan—sebagaimana dilakukan orang dewasa. Penghasilan tidak menentu tergantung jumlah kedelai yang terangkut pada hari itu. Pengalaman lainnya, sekadar untuk bertahan hidup bersama nenek dan dua orang pamannya ia pun turut kerja malam di pabrik dari jam 6 sore hingga jam 4 pagi. Pada saat kelas 6 SD hingga kelas 1 SMP ia pindah kerja di tukang mebel untuk mengampas dan mengangkat kayu, sehingga sekolahnya terbengkalai karena sering membolos. Ia tidak mengetahui keberadaan ayahnya, ia mengaku belum pernah bertemu dengan ayahnya. Suatu ketika pamannya memberitahukan bahwa kedua orang tuanya bercerai, kata paman ayahnya pernah menengok ketika ia masih kecil, sehingga belum bisa mengingat. Menurutnya, ibunya tidak mengetahui kalau ia dipekerjakan oleh neneknya, ibunya pernah marah kepada neneknya ketika ada saudara yang memberitahukan mengenai penderitaan yang dialami anaknya tersebut, sehingga ia kemudian diambil dari nenek tiri dan diasuh oleh teman ibu sesama TKIP (Rb 2014, wawancara 20 Juli).

Selain itu, sebagian di antara anak TKIP orang tuanya konflik atau bercerai sebelum ibunya bekerja ke luar negeri, sehingga pengasuhannya dilakukan oleh tetangga dekatnya. Pengalaman mereka terkonfirmasi dengan pengakuan Sri, pengasuh anak TKIP, yang menceritakan bahwa ibu dari anak yang diasuhnya sudah bercerai dengan suaminya sebelum ibunya menjadi TKIP, dan ketika ibunya ke luar negeri anak tersebut awalnya diasuh oleh uwaknya. Tetapi tidak lama uwaknya meninggal dunia, sehingga anak tersebut hanya sendirian di rumah, bibinya kadang-kadang datang pagi hari hanya untuk memasak. Anak tersebut kemudian diasuhnya hingga tamat SMP, berusia antara 14-15 tahun, tinggal di pesantren Cadangpinggan (Sr 2013, wawancara 13 Oktober). Paparan tersebut menunjukkan bahwa dinamika pengasuhan anak TKIP sebagian besar belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan sebagian anak mengalami kekerasan dalam pengasuhan.

Relasi TKIP dengan Keluarga dan Anaknya

Relasi TKIP dengan keluarga khususnya dengan anaknya, secara umum ada upaya untuk menjaga relasi di antara mereka, mereka saling berinteraksi, meskipun frekuensinya di antara anak TKIP berbeda-beda, namun secara umum belum menghargai pendapat anak. Pesan dalam interaksi antara mereka dengan ibunya atau sebaliknya, di antaranya saling menanyakan kabar dan saling memberi nasihat seperti rajin belajar, tidak pemalas, jangan seperti ayahnya, tidak berpacaran dulu selama masih sekolah dan sebagainya. Secara jelas bentuk komunikasi, frekuensi dan isi pesan dalam interaksi di antara mereka, sebagai berikut:

- a. Bentuk komunikasi anak TKIP dengan ibunya.

Relasi anak TKIP dengan ibunya terbatas melalui telepon atau sms (*short message service*) khususnya pada waktu liburan atau saat mereka pulang ke rumah dengan HP miliknya atau HP ayahnya atau keluarganya. Mereka tidak bisa telepon ibunya dengan alasan biayanya mahal, kecuali ibunya yang menelepon mereka. Namun di antara anak TKIP ada yang tidak memiliki nomor telepon ibunya, bahkan kedua orang tuanya pun tidak pernah meneleponnya. Hal tersebut antara lain sebagaimana pengakuan Mn: "*Sing kanae mama mimi beli ilok nelpon, kita e ya embuh yong ning kanae ge ora duwe nomere. Ngalami bengen nelpon meng bapak karo mimi nganggo Hp-e bibi sepisan lagi pen balik --Dari sana juga ayah ibu tidak pernah telepon, saya juga tidak tahu nomornya, pernah telepon ke sana itu menggunakan HP bibi sekali pada saat mereka akan pulang—* (Mn 2013, wawancara 30 Oktober).

- b. Frekuensi dalam berkomunikasi dengan ibunya

Frekuensi komunikasi di antara mereka dengan ibunya bervariasi, di antara mereka bisa telepon langsung dengan ibunya, sebagian pada saat libur atau kepulangan, sebagian lain antara 1-3 bulan sekali, sebagian lainnya rata-rata dua kali dalam seminggu. Hal tersebut sebagaimana pengalaman salah satu anak TKIP: "*baka ning umah kih ya nelpon ning mimi (ibu), sebute sms an bae... Kadang mama (ayah) sing nelpon mana, kadang mimi sing nelpon mene, biasae seminggu rong kali gitu... Tapi baka ning kene (baca; pondok) ya beli lok, mimie beli lok nelpon, paling mama bae"*—pada saat pulang ke rumah, bisa berhubungan dengan ibu, biasanya ayah yang telepon dulu atau sebaliknya, biasanya bisa dua kali dalam seminggu. Tetapi kalau di pondok tidak bisa komunikasi dengan ibu, kecuali dengan ayah— (Iq 2013, wawancara 29 Oktober). Pengakuan tersebut mengonfirmasi cerita ayahnya bahwa anaknya sekurang-kurangnya seminggu

sekali telepon ke ibunya, kadang kalau sedang di rumah mereka semaunya kapan saja bisa menghubungi ibunya. Sebagaimana dikatakan: "*Karo emboke, ya pada bae biasa jeh, sering telpon-telponan...ya kien tembek nelpon. Ya bocahku sekiyenge bu, rata-rata seminggu sepisan pasti nelpon, minimal seminggu sepisan pasti nelpon*" –dengan ibunya juga sama, biasa sering telepon-teleponan, ini baru saja mereka teleponan. Ya anak-anak itu sesukanya kapan saja tapi rata-rata seminggu sekali pasti telepon ibunya (Fr 2013, wawancara 14 Oktober).

c. Isi pesan dalam interaksi antara anak TKIP dengan ibunya.

Isi pesan yang disampaikan anak TKIP kepada ibunya dalam interaksi di antara mereka senada, intinya berharap kehadiran ibu, jangan terlalu lama di luar negeri, segera pulang dan jangan pergi lagi. Salah satunya sebagaimana diceritakan Dz: "Jangan terlalu lama di luar negeri ya mi, karena mimi juga di luar negeri tuh membuat anak selalu inget kalau enggak ada. Kalau terlalu lama di luar kan otomatis kesehatan mimi juga kan kadang berkurang, beda kalau ama di rumah" (Dz 2013, wawancara 29 Oktober). Pengalaman anak TKIP lain pesan untuk ibunya ingin cepat pulang, seperti berikut: "Pengennya mimi cepet pulang... kalau pengen kerja ya di sini aja enggak usah jauh-jauh ke sana, pulang aja mi... terus miminya bilang 'tanggung jeh entar sepuluh bulan lagi... nanti kalau pulang tidak akan berangkat lagi, capek di rumah aja'" (Az 2013, wawancara 13 Oktober). Anak TKIP lain selalu menanyakan kapan pulang dan jangan berangkat lagi, sebagaimana dikatakan:

"Kita kuh pesene ning mimi aja mangkat maning ya, wis pegel mimie gage balik, jare mimie kuh ya wis jeh mimie ko bli mangkat maning, toli jare mama e ngomong rencanae kuh gentenan, mama sing mangkat, mimi sing ning umah' tapi ya embuh enko mah pribe?"—saya selalu pesan kepada ibu agar jangan berangkat lagi, ibunya menjawab ya sudah ibu tidak akan berangkat lagi katanya gitu... ayahnya kemudian mengatakan, "rencananya memang begitu bergantian ayah yang ke luar negeri, ibunya di rumah." (Iq 2013, wawancara 29 Oktober)

Sementara isi pesan dari ibunya di luar negeri kepada anaknya sebagian besar meminta rajin belajar. Hampir semua anak mengaku setiap kali ibunya telepon selalu nasihatnya mengenai sekolah dan belajar, sebagaimana berikut: Rajin belajar: "*Sekolahe aja males, sekolah... belajar... belajar, belajar, keadaan e kepribe...*" –sekolah, jangan malas, belajar...keadaannya bagaimana—(Dn 2013, wawancara 13 Oktober); Menjadi orang yang berguna, yang sopan, jangan kasar sebagaimana dialami Dz: "*Ya sira kuh Dik aja kayak bapak, sira kuh sing penting*

mah belajar sing wekel, nuntut ilmu ya setinggi mungkin... ya jadilah orang yang berguna. Terus ya sing sopan, baka ning mamae aja kasar ngomonge, pokoke mah isie nasehat bae kuh..." –kamu Dik jangan seperti ayahmu, yang penting kamu harus belajar yang rajin, menuntut ilmu setinggi mungkin, agar menjadi orang yang berguna, yang sopan kalau dengan ayah Dz, isinya semua nasihat—(Dz 2013, wawancara 29 Oktober); Jangan pacaran dulu selagi masih sekolah: "*Ya kan kata mama jangan pacaran dulu kalo masih sekolah mah.. Entar aja kalau udah kerja, kan kalau udah punya uang sendiri, ya bisa nanggung sendirilah. Kan kalau sekolah masih ditanggung orang tua*" (Dz 2013, wawancara 29 Oktober).

d. Relasi gender yang timpang berkontribusi pada penelantaran anak

Pergeseran peran gender istri sebagai pencari nafkah seharusnya diimbangi dengan perubahan peran gender suami/ayah pada ranah domestik. Hanya sedikit suami TKIP yang bisa melakukan peran domestik menggantikan peran ibu untuk mengasuh anaknya, sementara sebagian besar anak TKIP lainnya kehilangan kasih sayang dari orang tua bahkan mereka telantar mengalami masalah sosial yang kompleks. Di antara sedikit suami TKIP yang mengasuh sendiri anaknya adalah Tm dan Wr, mereka beralasan mengasuh anak menjadi tanggung jawab dirinya selama istrinya ke luar negeri. Pengalaman Tm, kedua anaknya lebih dekat dengannya karena sepuluh tahun lebih mereka ditinggal ibunya sejak bayi berumur 17 bulan, sementara anak keduanya ditinggal ketika pemberangkatan kedua, berusia 2 tahun (Tm 2014, wawancara 2 Agustus). Pengalaman serupa dialami Wr, sebagai berikut: "*awit rabi miyang mana kuh reyng kabeh sing ngurusi bocah, tapi baka bengi dibaturi ning emak. Ya wis kudune ora bu reyng ngupai izin ning rabi kuh ya... dadi wong lanang e ora sing tanggung jawab urusan bocah* –sejak istri berangkat ke luar negeri, semua urusan anak saya yang mengurus, tapi kalau malam ditemani ibu... ya sudah seharusnya suami memberi izin istrinya keluar negeri, urusan anak menjadi tanggung jawabnya— (Wir 2013, wawancara 13 Oktober).

Dari pengalaman Tm dan Wir, sebagai suami ternyata mereka bisa melakukan pengasuhan terhadap anaknya pada saat istrinya bekerja ke luar negeri. Ketika peran istri bergeser menjadi pencari nafkah utama dengan bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suaminya melakukan pengasuhan bagi anak mereka. Namun pembagian peran antara suami isteritersebut belum menjadi tradisi dalam masyarakat, sehingga baru dialami sebagian kecil suami TKIP yang siap berbagi peran untuk pengasuhan anaknya. Hal

tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan anak yang ditinggal ibunya ke luar negeri dalam budaya patriarki belum menjadi tanggung jawab ayahnya meskipun ayahnya ada di rumah. Temuan tersebut senada dengan pengamatan aktivis pekerja migran sekaligus Direktur Migrant Care berikut:

Konstruksi masyarakat kita patriarki, masyarakat membuat justifikasi bahwa anak-anak yang ditinggal ibunya ke luar negeri telantar, tertinggal, alasannya selalu bilang karena ditinggal ibunya padahal bapaknya ada di rumah. Sebenarnya bisa berbagi peran, ketika ibunya bekerja ke luar negeri seharusnya bapaknya yang melakukan peran pengasuhan tersebut tetapi peran bapak tidak berfungsi. (Hidayah 2014, h. 2)

Mengacu pada pola relasi antara TKIP dengan keluarganya khususnya dengan anaknya atau sebaliknya, yang terbangun sebatas komunikasi verbal yang timpang dalam komunikasi jarak jauh yang sangat terbatas. Meskipun terasa sekali ada kerinduan di antara mereka, namun pada lingkungan mikronya (*microsystem*) tidak terbangun relasi yang setara dengan kelekatan (*attachment*) yang saling memengaruhi, saling menghargai untuk kepentingan terbaik anak sebagai tanggung jawab orang tua. Secara psikis dan sosial ketika anak dalam usia balita ditinggal ibunya ke luar negeri dengan alasan apapun termasuk untuk mencari nafkah tanpa jaminan pengasuhan yang jelas, sesungguhnya tidak dibenarkan karena anak dalam posisi tidak berdaya. Dalam konteks tersebut, secara hukum anak TKIP bisa disebut sebagai pihak yang "dikorbankan" untuk kepentingan orang dewasa. Konstruksi budaya patriarki yang melekatkan pengasuhan anak sebagai tanggung jawab istri berkontribusi pada penelantaran anak TKIP, karena meskipun suaminya ada di rumah anak mereka telantar dan mengalami masalah sosial yang kompleks.

Implikasi Pengasuhan Jarak Jauh pada Kesejahteraan Anak

Dalam konsep *Global Care Chain*, pengasuhan jarak jauh antara ibu di negara tempat TKIP bekerja (*link* satu), dengan anak mereka di negara asal (*link* lain) dimungkinkan apalagi media dan teknologi informasi canggih sangat mudah diakses. Namun pengasuhan berbasis keluarga dengan orang tua atau pengganti orang tua tetap sangat penting karena memberikan efek kelekatan (*attachment*) yang memengaruhi perkembangan anak dan lingkungannya baik secara fisik, psikis maupun sosial. Dari pengalaman hidup keseharian anak TKIP gambarnya sebagai berikut:

a. Kebutuhan primer dan sekunder anak secara fisik terpenuhi

Pemenuhan kebutuhan primer anak TKIP seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dan sebagainya sebagian besar tercukupi. Hal tersebut sebagaimana dikatakan suami TKIP: "*jare basane ari sandang, pangan papan bae ta cukup dibanding tangga sing ning kene... ya iki lih buktine, duwe umah, bisa nyawah, kasilane kuh go bocah ora..—kalau sekadar, makan, pakaian dan rumah sudah cukup terpenuhi dibanding dengan tetangganya.. Buktinya antara lain punya rumah ini, bisa menggarap sawah dan penghasilannya juga untuk biaya anak—*" (Wir 2013, wawancara 13 Oktober). Selain itu, kebutuhan sekunder sebagian besar anak TKIP juga terpenuhi, di rumah mereka memiliki motor, perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik yang relatif lengkap seperti mebel, TV berwarna, kulkas, dan sebagainya. Hampir semua anak TKIP memiliki *handphone* (HP), di antara mereka mengaku sejak kelas dua SD sudah memiliki HP sendiri (Fn 2013, wawancara 30 Oktober), kelas empat SD memiliki PS (*play station*) versi baru, komputer lengkap dengan *video game* (Iq 2013, wawancara 29 Oktober), punya motor (Az 2013, wawancara 13 Oktober) dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder bagi anak TKIP sebagaimana digambarkan di atas, tidak berarti kesejahteraan anak terpenuhi karena dalam kehidupan anak membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua atau orang dewasa yang dekat dengan mereka.

b. Psikososial anak terganggu

Pertumbuhan psikis dan sosial (psikososial) sebagian besar anak TKIP terganggu, apalagi bagi sebagian anak TKIP yang hidup dalam konflik orang tua, ayahnya berselingkuh atau poligami, ibunya berganti-ganti suami/poliandri, ayah kabur dan tidak bertanggung jawab, sehingga anak telantar. Mereka sebagian besar mengalami masalah sosial yang kompleks dan mengalami disorientasi yang memerlukan intervensi tidak saja bagi anak tetapi juga bagi orang tua mereka. Beberapa pengalaman tersebut secara jelas di antaranya sebagai berikut:

• Az, kebingungan dan jiwanya terganggu

Perselingkuhan (poligami) ayahnya meledakkan konflik dalam kehidupan keluarga, berujung pada perceraian ayah dan ibunya. Hal tersebut menyisakan kebingungan bagi Az yang baru berusia sekitar 7 tahun karena merasa makin jauh dari perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya. Meskipun ayahnya mengajak untuk tinggal bersama dengan ibu tirinya tetapi Az

menolak karena lebih nyaman tinggal bersama neneknya hingga sekarang. Az dan neneknya merasa terpuak dan keduanya mengalami guncangan jiwa pada saat ayahnya menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan mereka, sebagaimana diceritakan: "Ya itu masalahnya kalau enggak ada ibu... bapak kan... (kalimatnya terputus raut wajahnya tampak bersedih) tahu-tahu udah nikah aja, udah punya anak..." Neneknya menambahkan bahwa: "Dadi kuen kuh belih wewarah maning, dadi anak kitae tak omongi...ari anak dewek diengoni dewek bae kon ngempani anak kowalon....? toli ya mariyan" – perkawinan tersebut tidak pernah diberitahukan, jadi saya sampaikan ke anak saya bahwa anak sendiri diasuh sendirian tapi tiba-tiba sekarang harus memelihara anak tiri...setelah itu kemudian mereka bercerai—(Nenek Az 2013, wawancara 13 Oktober).

Az terkesan berkompromi dan berusaha mengharmoniskan kembali hubungan dengan ayahnya, sebagaimana diceritakan: "Ya mungkin penyebabnya, apa ya... ibaratnya sama ama saya kurang dapat perhatian dari mimi –istri– kan. Mimi itu pulangnya kan sebentar, terus juga ama bapak tuh, jarang... berdua jalan atau apa tuh enggak pernah, kalau pulang juga enggak pernah tidur di rumah bapak" (Az 2013, wawancara 13 Oktober). Menurutnya ia terpaksa beradaptasi karena tidak punya pilihan, meskipun awalnya berat dan canggung bahkan kesal ketika beberapa kali ayahnya mengajak untuk menemui ibu tirinya. Tetapi ia menyadari harus menerima kenyataan ini tuturnya, dengan kalimat yang terbata-bata dan pandangan mata yang menerawang kosong, tampak sekali ada beban psikologis yang tidak sederhana. Suasananya menjadi hening, semua terdiam, ketika Az menitikkan airmatanya setetes demi setetes. Dengan suara pelan sambil menahan tangisnya ia mengakui: "Ya baru sekarang-sekarang aja saya dekat ama ibu tiri tuh..." (Az 2013, wawancara 13 Oktober).

- Adw, menanggung malu ibunya poliandri dan pulang dengan membawa bayi

Adw dengan adiknya bertahun-tahun menanti kepulangan ibu yang dirindukannya, ternyata harus menerima kenyataan pahit, ibunya pulang dari luar negeri dengan menggendong seorang bayi laki-laki berusia 6 (enam) bulan, hasil perkawinannya dengan laki-laki berkebangsaan Bangladesh di Saudi. Ketika ayahnya bercerita bahwa ibunya meminta izin untuk menikah dengan laki-laki yang menolongnya ketika kabur dari majikannya, ayahnya mengatakan kepadanya sebagai risiko bekerja di luar negeri. Begitu juga ketika ibunya melahirkan anak dari hasil perkawinannya ia pun diperlihatkan sms ibunya yang dikirim kepada ayahnya

selalu dikatakannya merupakan risiko kerja di luar negeri. Namun ketika ibunya pulang dengan menggendong bayinya, mereka tidak kuasa menghadapinya, bahkan ketika ibunya datang, ayahnya tiba-tiba memeluk Adw sambil menangis dan berkata: "...*ema teka gawa bayi jeh...*" –ibu datang membawa bayi. Pernyataan tersebut dijawab anak sulungnya: "*ya wis bapak sing kuat*" – ya sudah bapak yang kuat ya tutur Adw—(Adw 2014, wawancara 20 Juli). Menurutnya, ia ingin sekali merahasiakan masalah yang dihadapi orang tuanya, namun tidak mungkin ditutupi karena semua tetangga mengetahui dan mengunjingkan ibunya, sebagaimana diceritakannya lagi:

"...bayangin aja bu, bagaimana perasaannya... selama bertahun-tahun ditinggal ibu... (matanya mulai berkaca-kaca dan meneteskan air mata) tiba-tiba menghancurkan... harapan saya... (melanjutkan dengan terbata...)...susah diceritakan bu... (kemudian wawancara terhenti, ia menangis cukup lama). Saya ingin orang lain gak tahu masalah keluarga ini tapi gak mungkin ditutupi, semua orang sudah tahu... itu yang membuat saya malu banget. Di sekolah juga saya diejek teman-teman... sampai saya ingin punya teman yang mau dekat dengan saya pada saat duka seperti ini." (Adw 2014, wawancara 20 Juli)

- c. Anak rentan menjadi korban/pelaku kekerasan dan tindak kriminal

Dalam konteks keluarga, sebagian besar anak TKIP mengalami kekerasan dalam pengasuhan, di antara pengakuan mereka adalah nenek sayang tapi setiap hari dicubit (Iq 2013), dibentak-dibentak dan dimarahi (Mn 2013), bahkan dieksploitasi (Rb 2013). Dalam konteks lingkungan teman sebaya, anak yang kehilangan pengasuhankhususnya ketika memasuki usia remaja, mereka rentan terpengaruh oleh lingkungan pergaulan negatif, seperti geng motor disertai tindak kekerasan, pengguna narkoba, hubungan seks bebas dan sebagainya. Beberapa pengalaman anak TKIP di antaranya sebagai berikut:

- Az, teman-teman di kampungnya ikut geng motor dan 'nge-pil'

Menurutnya hampir semua teman sebayanya di kampung TKI sejak SD sudah memiliki motor, sehingga mereka sering kebut-kebutan bersama dan terlibat dalam geng motor. Di antara merekaminum pil atau mengisap narkoba adalah hal biasa sehingga ia khawatir dirinya terbawa oleh arus pergaulan tersebut. Ia dengan kesadarannya kemudian memilih untuk masuk ke pesantren, sebagaimana dikatakan: "Masuk ke pondok itu kepengennya sendiri, kalau di rumah takut enggak

bener, takut terbawa ama temen, kan udah punya motor, biasa balap-balapan... kebanyakan temannya pada minum pil, mabuk-mabukan, takutnya terpengaruh, bisa ke bawa kan..." (Az 2013, wawancara 13 Oktober).

- Rb, sekolahnya terbelengkalai karena merokok, mabuk dan main *kuclak*

Pengalaman Rb saat kelas 1 SMP sebelum di pesantren hidup kesehariannya lebih banyak dihabiskan bersama teman-teman yang kebanyakan mereka orang dewasa pekerja di pabrik. Menurutnya, sisi positifnya berteman dengan orang dewasa bisa mengikuti pemikiran mereka lebih cepat dewasa, memperoleh bimbingan keterampilan kerja, memiliki solidaritas dengan sesama teman, saling membantu, mudah bergaul dan sebagainya. Tetapi sisi negatifnya, terbawa merokok, minum minuman keras, main *kuclak* (sejenis judi untuk pemula atau judi kecil-kecilan), memeras uang di jalan dan sebagainya, sehingga akhirnya ia sadar dan terpikir untuk masuk ke pesantren. Menurutnya kesadaran tersebut benar-benar hidayah Allah (Rb 2014, wawancara 20 Juli).

Pengalaman kedua anak TKIP sebagaimana paparan di atas hanya sebagian dari masalah yang dialami anak TKIP. Hal tersebut terklarifikasi oleh kesaksian tokoh masyarakat bahwa anak-anak yang orang tuanya menjadi TKIP di luar negeri tidak jarang kesehatan dan pertumbuhannya tidak terawat (Husnan 2014). Mereka terpapar bahkan memakai narkoba, pergaulan bebas tanpa pengawasan orang tua, hamil di luar nikah dan sebagainya sehingga sekolah atau pendidikan mereka terganggu (Sanawi 2013; Badriyah 2013). Hal tersebut dibenarkan juga oleh pengasuh Pesantren Cadangpinggan (Yasin 2013), menurutnya fenomena tersebut tanpa kecuali, termasuk di antara mereka yang ibu penggantinya diperankan oleh ayahnya sendiri pun mengalami hal yang sama. Gambaran di atas terkonfirmasi dengan hasil riset pemantauan BNP2TKI di beberapa daerah kantong TKI bahwa tingkat kenakalan remaja dari anak TKI termasuk TKIP cukup tinggi yang membutuhkan penanganan dan solusi sistemik dan komprehensif, sebagaimana dikemukakan Ketua BNP2TKI berikut:

"Riset kami di beberapa daerah kantong TKI salah satu hasilnya adalah kriminalitas dan kenakalan remaja di sana itu tertinggi dilakukan oleh anak TKI, jadi mereka mengalami disorientasi, mungkin tidak ada kasih sayang yang cukup dan sebagainya... itu luar biasa menurut saya, suatu dampak sosial yang perlu dicarikan solusinya secara menyeluruh" (Hidayat 2014, wawancara 17 Juni).

d. Anak TKIP tidak memiliki jaminan sosial

Dari seluruh anak TKIP yang menjadi informan, tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki kartu jaminan kesehatan, jaminan pendidikan atau jaminan sosial sejenis asuransi baik dari pemerintah atau dari swasta, kecuali bahwa sebagian keluarga TKIP memiliki tabungan dari kiriman ibunya. Pengalaman mereka ketika masih di rumah, kalau sakit dibawa keluarga yang mengasuhnya ke Puskesmas untuk berobat dan ketika di pesantren mereka memperoleh obat dari pengurus pondok (Az, D, F 2013), pada anak laki-laki pun sama (Mkn, F, G 2013) bahkan sebagian di antara mereka tidak pernah berobat sembuh sendiri. Begitu juga terkait jaminan pendidikan, sepenuhnya biaya mereka dari keluarganya yang berasal dari kiriman ibunya (Az, N, D 2013), sebagian di antara mereka mengetahui memiliki tabungan untuk biaya sekolahnya tetapi dipegang oleh tantenya (Mn 2013). Hal tersebut terkonfirmasi dengan pengakuan suami TKIP bahwa mereka tidak memiliki jaminan sosial, sebagaimana pengakuan berikut: "*ya boro-boro ngarti asuransi laka sing ngongkon...laka, laka sing ngupai weruh.. biaya sekolah ya sing dewek kabeh, baka lara ya berobat sing dewek bae.. -yatidak mengerti mengenai asuransi, tidak ada yang menyuruh dan memberitahukan kegunaannya.. biaya sekolah dan biaya kesehatankalau sakit ditanggung sendiri—"* (Wir 2013, 13 Oktober).

Mengacu pada paparan di atas terkait pengasuhan jarak jauh yang dilakukan TKIP dari luar negeri tidak berimplikasi pada pemenuhan kesejahteraan anak, mereka mengalami masalah psikososial yang kompleks. Hal tersebut di antaranya karena pengasuhan jarak jauh tidak didukung dengan pengasuhan berbasis keluarga yang kuat yang dipersiapkan sebelum ibunya ke luar negeri. Pengasuhan anak seharusnya bisa dipersiapkan dan sama pentingnya dengan penyiapan keterampilan TKIP oleh PJTKI. Pastikan sebelum keberangkatan ke luar negeri bahwa anak yang ditinggalkan mendapat pengasuhan yang optimal baik dari lingkungan *extended family* maupun pihak lain sebagai orang tua pengganti dengan sukarela ataupun dibayar. Dari sisi kesejahteraan terkait peningkatan taraf hidup mereka juga kurang termotivasi karena mereka kehilangan pengasuhan, meskipun hubungan sosial dengan keluarga terpelihara. Begitu juga masalah yang terjadi khususnya terkait perkembangan psikis dan sosial pada anak, tidak dikelola secara komprehensif, sehingga sebagian besar anak TKIP yang mengalami masalah tidak ada intervensi atau pendampingan yang memadai dari keluarga maupun sekolah dan lingkungannya secara terpadu.

Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi

TKIP secara ekonomi berkontribusi cukup besar terhadap kesejahteraan keluarganya, juga kesejahteraan anak yang secara fisik terpenuhi namun secara psikososial mengalami masalah yang kompleks. Anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri, sebagian besar kehilangan kasih sayang, tidak mendapatkan pengasuhan secara optimal (*deficit care*) dan tidak memiliki jaminan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia, beberapa bentuk pengasuhan alternatif berbasis komunitas dalam keluarga maupun lembaga keagamaan seperti pesantren sudah dilakukan namun masih bersifat individual, belum terinstitusi dan belum ada dukungan kebijakan.

Defisit care yang dialami oleh anak TKIP di negara pengirim merupakan bentuk ketidakadilan dari *global care chain* yang harus dijembatani dan dicarikan solusinya melalui jaminan pengasuhan dan kesejahteraan anak TKIP yang terintegrasi dalam kebijakan TKI secara komprehensif. Untuk itu, perlu memperkuat dukungan pengasuhan anak TKIP berbasis keluarga, menyadarkan sekolah dan lingkungannya untuk memberikan pendampingan bagi anak TKIP yang mengalami masalah dengan pendekatan yang holistik. Selain itu, perlu penguatan kesadaran bagi TKIP dan keluarganya mengenai pentingnya jaminan hak dan kesejahteraan anak dengan cara memanfaatkan penghasilan TKIP pada investasi yang berorientasi pada jaminan kesejahteraan sosial anak, sebelum digunakan untuk kebutuhan hidup lainnya. Pada level kebijakan, perlu memperkuat advokasi kebijakan bagi jaminan pengasuhan dan kesejahteraan anak TKIP agar terintegrasi dalam kebijakan TKI secara sistemik dan komprehensif dengan melibatkan semua *stakeholder* terkait termasuk media.

Daftar Pustaka

Anshor, MU 2017, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Aryani, S 2012, *Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Dalam Global Care Chain Studi Kualitatif Tentang Pekerja Rumah Tangga Indonesia di Singapura*, tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Depok.

Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2009, *Laporan Tahunan*, BNP2TKI, Jakarta.

Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2012, *Sejarah TKI*, diakses 24 Maret 2013, www.bnp2tki.go.id

Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2012, *Statistik*, diakses 12 Februari 2013, www.bnp2tki.go.id

Bakker, C, Elings-Pels, M & Reis M 2009, "The Impact of Migration on Children in The Caribbean", *paper*, UNICEF office for Eastern Caribbean, Caribbean.

Bastia, T 2009, "Women's migration and the crisis of care: grandmothers caring for grandchildren in urban Bolivia", *Gender and Development*, vol. 17, no. 3, hh. 389-401.

Bronfenbrenner, U 1994, *Ecological Models of Human Development*, *International Encyclopedia of Education*, vol. 3, 2nd edn, hh. 37-43, Elsevier, Oxford.

Bronfenbrenner, U 1979, *The Ecology of Human Development*, Harvard University Press, Cambridge.

Hidayah, A, Susilo, W 2013, *Selurus: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Migrant Care, Jakarta.

Hochschild, A 2001, "The Nanny Chain", *prospect.org*, diakses 5 Maret 2013, <http://prospect.org/article/nanny-chain>.

Hondagneu-Sotelo, P & Avila, E 1997, "I'm Here, but I'm There": The Meanings of Latina Transnational Motherhood, *Gender and Society*, vol. 11, no. 5, hh. 548-571.

Irianto, S 2011, *Akses Keadilan dan Migrasi Global*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Kustini 2012, *Strategi Pengasuhan Anak Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan*, Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi, Depok.

Parrenas 2001, "Mothering from a Distance: Emotions, Gender, and International Relations in Filipino Transnational Families", *Feminist Studies*, vol. 27 no. 2, hh. 361-390.

Parrenas 2005, "The Gender Paradox in the Transnational Filipino Migrant Women", *Asia and Pacific Migration Journal*, vol. 14, no. 3, hh. 243-267.

Rosadi, I 2010, *Konsekuensi Migrasi Internasional Terhadap Relasi Gender (Studi tentang Buruh Migran Internasional yang Bekerja di Luar Negeri Di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, disertasi, Departemen Sosiologi Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.*

Ukwatta, S 2010, *Economic and Social Impacts of the Migration of Srilankan Transnational Domestic Workers of Families and Children Left Behind*, Adelaide, United State of America.

Yasin, S 2013, *Profil Pesantren Cadangpinggan*, Pesantren Cadangpinggan, Indramayu.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
5. Tracy Wright ebster, PhD (University of Western Australia)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Universitas Gadjah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
8. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem Harvard Style, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, jam 21.10 WIB, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, KOMPAS, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.

Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

